

KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM HUKUM INDONESIA



Oleh :

Rahayu, SH.MHum

Makalah disampaikan pada

“Sosialisasi Tentang Kekerasan Berbasis Gender di 7 Kabupaten/Kota”

Diselenggarakan oleh :

Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah

Salatiga, 10 Desember 2003

KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM HUKUM INDONESIA *)

Oleh : Rahayu, SH,M.Hum **)

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun dalam kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk ketidakadilan yang ada, seperti *marginalisasi* (peniskinan), *subordinasi* (anggapan / perlakuan bahwa perempuan derajatnya lebih rendah), *stereotipi* (pelabelan), *violence* (kekerasan), *diskriminasi* (pembedaan), *multi burden* (beban kerja berlebih), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Bentuk ketidakadilan gender sb. Tidak dapat dipisahkan, karena satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Violence atau Kekerasan terhadap Perempuan.

Kekerasan (*Violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan banyak sekali bentuknya, salah satu diantaranya adalah *kekerasan berbasis gender* yang sering dialami perempuan.

Berdasarkan Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang juga tercantum dalam dokumen Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing tahun 1995, istilah *kekerasan terhadap perempuan* diartikan sebagai segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk ancaman atau perbuatan semacam itu, paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.

Kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

*) Disampaikan pada 'Sosialisasi tentang Kekerasan Berbasis Gender di 7 Kabupaten / Kota' yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Prppinsi Jawa Tengah di Salatiga pada tanggal 10 Desember 2003.

**) Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.